

PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DI MADRASAH ALIYAH

Umul Hidayati

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan | Balitbang dan Diklat Kemenag RI
Jl. MH Thamrin No. 06 Jakarta Pusat | Email: hidayatikuncoro@yahoo.com

Abstract

This research is conducted to identify the condition of libraries in Madrasah Aliyah (MA), whether they have fulfilled the national standard criteria of a library. This study uses the quantitative approach survey method and conducted in 9 provinces; West Java; East Java; Central Java; North Sumatera; NTB; South Kalimantan, West Kalimantan, NTT, and Maluku. This research indicates that the libraries in Madrasah Aliyah have not fulfilled the National standard criteria "Standar Nasional Perpustakaan" (SNP) and the lack of fulfillment is calculated by the percentage of 49,6%. Among 7 variables of the research; the goal and use, the standard human resource, standard facility, standard collection, standard establishment and development of the library, 60,8% only belongs to the variable of standard establishment and development which is considered adequate for the SNP. On the other hand, the lowest variables in fulfilling the SNP are; the standard of facility, human resource, and goal and use of the library. One of the prominent factors of the SNP's lack fulfillment is the ineffective policy by the head of Madrasah in establishing libraries.

Keyword: fulfillment, National standard, library, Madrasah Aliyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perpustakaan di Madrasah Aliyah apakah sudah memenuhi kriteria sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Studi dilakukan di 9 propinsi yaitu di Jabar; Jatim; Jateng; Sumut, NTB; Kalsel, Kalbar, NTT dan Maluku dengan menggunakan metode survei dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 49,6%. Dari tujuh variabel yang diteliti yaitu tujuan dan fungsi perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar sarana prasarana, standar koleksi, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan, hanya variabel standar pengelolaan yang telah mencapai kategori cukup memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 60,8%. Sedangkan variabel yang paling rendah pemenuhannya adalah standar sarana prasarana, standar tenaga perpustakaan, tujuan dan fungsi perpustakaan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab belum terpenuhinya standar nasional perpustakaan di MA antara lain kebijakan kepala madrasah terhadap penyelenggaraan perpustakaan yang belum maksimal.

Kata Kunci: Pemenuhan, Standar Nasional, Perpustakaan, Madrasah Aliyah

PENDAHULUAN

Dalam UU RI No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 23 ayat 1 dan 3 disebutkan bahwa setiap madrasah menyelenggarakan

perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan tersebut wajib memiliki koleksi yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Naskah diterima 29 Februari 2014. Revisi pertama, 22 Maret 2014. Revisi kedua, 1 April 2014 dan revisi terakhir 3 April 2014.

Perpustakaan yang terorganisir atau dikelola secara baik dan sistematis, akan dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan semisal perpustakaan.¹

Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang memenuhi kriteria ideal sebagai sarana penunjang pembelajaran, antara lain perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang baik seperti ruang membaca yang nyaman, jumlah koleksi yang lengkap dan bervariasi, kondisi SDM yang memadai serta pelayanan yang mudah dan cepat bagi pengunjung.

Jika setiap madrasah mampu menyediakan perpustakaan dengan kriteria tersebut, maka keberadaan perpustakaan madrasah tentu akan dapat menarik minat peserta didik dan pendidik untuk selalu mendatangi perpustakaan dan memanfaatkan berbagai koleksi yang dimilikinya sebagai sumber belajar, sehingga kehadiran perpustakaan fungsional dan mampu menunjang kegiatan pembelajaran di madrasah dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Namun kita sadari bahwa kondisi perpustakaan di sebagian madrasah masih kurang memadai dan belum memenuhi Standar. Secara umum penyelenggaraan perpustakaan di madrasah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan sbb: 1) ruang perpustakaan sempit dan letaknya kurang strategis; 2) koleksi bahan pustaka terbatas, minim alternatif selain buku dan banyak yang sudah ketinggalan zaman; 3) jumlah petugas perpustakaan (pustakawan) yang profesional terbatas; 4) pelayanan kurang maksimal dan belum mampu memberikan pelayanan yang prima (cepat, mudah dan

¹ Dian Sinaga. 2007. *Mengelola Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Kreasi Media Utama, h.15

ramah); 5) promosi dan publikasi terhadap keunggulan perpustakaan jarang/tidak pernah dilakukan; 6) kebijakan kepala madrasah belum 'mendukung' keberadaan dan keberlangsungan perpustakaan; 7) kurikulum yang disusun belum mengintegrasikan pentingnya perpustakaan; 8) jam buka terbatas; 9) fasilitas berbasis teknologi belum terpenuhi; 11) pengelolaan kurang inovatif dan kreatif.²

Kondisi belum memudahinya perpustakaan madrasah ini juga dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian, misalnya penelitian Oleh Nihayati yang dilakukan di seluruh MAN di Bantul dalam Skripsinya berjudul "*Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Sesuai SNI No. 7329 tahun 2009*", hasilnya bahwa perpustakaan di MAN Bantul baru memenuhi SNI sebesar 62%. Penelitian oleh Mia tentang kondisi perpustakaan PPMI As-Salam, hasilnya bahwa kondisi perpustakaan PPMI As-Salam juga belum memenuhi standar, misalnya pelayanan belum maksimal dan masuk kategori cukup (skor 62); koleksi perpustakaan masuk kategori kurang (skor 38); tata ruang cukup (skor 69) dan lokasi perpustakaan kurang strategis (skor 56).

Untuk mengetahui bagaimana kondisi perpustakaan madrasah, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2013 telah melakukan penelitian berjudul "*Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan di Madrasah Aliyah*", yang dilakukan di 9 propinsi. Penelitian ini penting dilakukan mengingat perpustakaan merupakan sarana penunjang pembelajaran yang memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Namun bagaimana kondisi perpustakaan di madrasah, apakah sudah memiliki peran tersebut dan apakah telah memenuhi Standar Nasional sebagaimana dikehendaki UU, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi perpustakaan madrasah (MA) mencakup

² Admin Pratama dalam sebuah artikelnya berjudul "*Inovasi dalam Pengelolaan Perpustakaan*", http://perpustakaan.narotama.ac.id/2012/02/14/inovasi_pengelolaan.perpustakaan, diunduh tgl 13 Januari 2013

sarana prasarana, koleksi bahan pustaka, kondisi SDM pengelola, bentuk layanan yang diberikan dan minat pemustaka.

Dari latar belakang masalah tersebut, permasalahan penelitian ini adalah sejauhmana kondisi perpustakaan madrasah telah memenuhi kriteria sesuai dengan standar nasional perpustakaan dilihat dari:

1. Kondisi kebijakan kepala madrasah dalam mendukung penyelenggaraan dan keberlangsungan perpustakaan madrasah;
2. Kondisi DM atau tenaga perpustakaan baik secara kualitas maupun kuantitas;
3. Kondisi sarana prasarana perpustakaan dilihat dari kondisi gedung dan fasilitas yang dimiliki;
4. Kondisi koleksi bahan pustaka dilihat dari jumlah, jenis/variasi dan perkembangannya;
5. Kondisi pelayanan dilihat dari jenis dan teknik layanan;
6. Kondisi penyelenggaraan/pengelolaan perpustakaan.

Kerangka Konseptual

Pengertian Perpustakaan

Menurut istilah, banyak para ahli yang memberikan definisi tentang perpustakaan. Menurut Sutarno,³ “perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau gedung itu sendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan bila diperlukan pembaca. Menurut Larasati⁴ “perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai

³ Sutarno NS, 2003, *Perpustakaan dan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h.11-12

⁴Larasati Milburga, dkk, 1991, *Membina Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Kanisius, h.17

sumber informasi. Sedangkan menurut Bafadal, perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku maupun bahan non buku, yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi pemakainya.⁵

Dalam UU,⁶ dijelaskan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka baik berupa buku atau non buku seperti bahan cetak (majalah, laporan, pamflet, prosiding, manuskrip, naskah, lembaran) dan berbagai karya media audio visual (film, slide, kaset, piringan hitam, CD, VCD, mikrofilm), yang diatur, diorganisasikan dan diadministrasikan secara sistematis, agar memberi kemudahan bagi para pemakai untuk memanfaatkannya sebagai sumber informasi, memperoleh pengetahuan tentang berbagai ilmu pengetahuan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka baik berupa buku dan non buku, yang diatur, diorganisasikan dan diadministrasikan dengan cara tertentu secara sistematis, agar memberi kemudahan bagi para pemakai untuk memanfaatkannya sebagai sumber informasi, atau untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang berbagai hal/ilmu pengetahuan. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menyimpan koleksi berupa buku-buku, tetapi juga bahan pustaka non buku seperti bahan cetak (majalah,

⁵ Ibrahim Bafadal, 2011, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.VIII, h.3.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, Bab. I Pasal 1 Ayat 1,2,3 dan 4.

laporan, pamflet, prosiding, manuskrip, naskah, lembaran) dan berbagai karya media audio visual (film, slide, kaset, piringan hitam, CD, VCD, mikrofilm) dsb.

Tujuan Perpustakaan

Perpustakaan memiliki beberapa tujuan. Menurut Sutarno, tujuan perpustakaan adalah untuk menyediakan fasilitas, sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran.⁷ Sedangkan menurut Prastowo⁸, tujuan perpustakaan sekolah adalah: 1) Mendorong dan mempercepat penguasaan membaca peserta didik; 2) Menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca serta membantu menulis kreatif bagi peserta didik; 4) Menyediakan berbagai sumber belajar/informasi; 5) Memperluas dan memperkaya pengalaman belajar; 7) Memberikan hiburan sehat melalui kegiatan membaca, sumber bacaan yang bersifat kreatif dan ringan, seperti cerita fiksi, cerpen, novel dsb. dengan demikian penyelenggaraan perpustakaan madrasah dikatakan memenuhi standar, jika di antaranya memiliki tujuan sebagaimana diuraikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelenggaraan perpustakaan madrasah juga harus memiliki tujuan membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan minat dan kebiasaan membaca; membantu menulis kreatif; menyediakan sumber belajar/informasi; memperluas dan memperkaya pengalaman belajar dan memberikan hiburan sehat melalui kegiatan membaca sumber bacaan yang kreatif dan ringan, seperti cerita fiksi, cerpen, novel dsb.

Fungsi Perpustakaan

Disamping memiliki tujuan, perpustakaan juga memiliki fungsi dalam menjalankan perannya bagi dunia pendidikan. Dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bab.

⁷ Sutarno NS, *Op Cit*, h. 34.

⁸ Andi Prastowo, 2012, *Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional*, Jogjakarta: Diva Press, Cet-I, h. 50.

I pasal 3 disebutkan bahwa perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, pusat informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Yusuf dan Suhendar dalam Andi Prastowo bahwa fungsi perpustakaan paling tidak ada empat yaitu fungsi *educative*, *informative*, rekreasi dan riset atau penelitian sederhana.⁹ Sedangkan Ibrahim Bafadal membagi fungsi perpustakaan sekolah menjadi lima,¹⁰ yaitu:

Pertama, Fungsi Educative, yaitu perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum, membangkitkan minat baca peserta didik, daya ekspresi, kecakapan berbahasa, gaya pikir yang rasional, kritis serta mampu membimbing dan membina para siswa cara menggunakan dan memelihara bahan pustaka dengan baik.

Kedua, Fungsi Informative, yaitu perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang memuat informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan yang bermutu dan uptodate bagi pemustaka yang memerlukannya.

Ketiga, Fungsi Rekreasi, yaitu perpustakaan juga menyediakan buku-buku yang bersifat rekreatif (hiburan) dan bermutu, sehingga bermanfaat bagi pemustaka untuk mengisi waktu senggang.

Keempat, Fungsi Riset/penelitian, yaitu perpustakaan menyediakan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber/obyek penelitian sederhana dalam berbagai bidang studi/kajian ilmiah.

Kelima, Fungsi Administrasi, yaitu perpustakaan harus mengerjakan pengolahan / pemrosesan bahan-bahan pustaka dan menyelenggarakan sirkulasi yang praktis, efektif dan efisien.

Pengolahan/pemrosesan disini maksudnya adalah kegiatan dalam mengelola bahan

⁹ Yusuf dan Suhendar dalam Andi Prastowo, *Op Cit*, h.53-54.

¹⁰ Ibrahim Bafadal, *Op Cit*, h. 6-8.

pustaka yang dimulai dari pemeriksaan semenjak bahan pustaka baru datang hingga siap disajikan di rak penyajian dan dapat dimanfaatkan pemustaka.¹¹ Kegiatan pengolahan dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu pengelolaan bahan pustaka berupa buku, non buku dan pandang dengar (*oudio visual*). Untuk bahan buku, kegiatannya meliputi inventarisasi (pemeriksaan, pengecapan, pencatatan dalam buku induk); klasifikasi koleksi (pengelompokan buku berdasar subjek/isi); katalogisasi (proses pembuatan katalog); penyandian (pembuatan nomor buku); penyusunan kartu katalog sesuai urutan abjad (berdasarkan nama pengarang, judul buku, isi/subjek); penyusunan buku dalam rak sesuai urutan abjad (berdasarkan nama pengarang, judul buku). Untuk bahan non buku, kegiatannya meliputi pembuatan kartu baik untuk majalah, harian terbit/ koran dll. Untuk bahan pandang dengar, kegiatannya meliputi pencatatan dan pembuatan nomor urut. Sedangkan sirkulasi adalah kegiatan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.

Berdasarkan uraian tersebut, perpustakaan madrasah juga harus memiliki fungsi-fungsi antara lain fungsi educative, informative, rekreasi, penelitian dan administrasi.

Perpustakaan yang Ideal

Perpustakaan yang ideal paling tidak perpustakaan yang mampu memenuhi kriteria tertentu seperti perpustakaan yang mampu melayani kebutuhan pengunjungnya, mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai sarana pendidikan, mampu mengimbangi perkembangan iptek dan informasi, mampu menjadi sumber belajar bagi para peserta didik dan mampu mengaplikasikan system otomasi. Menurut Marmoah,¹² perpustakaan sekolah yang ideal adalah perpustakaan yang memenuhi kriteria: 1). memiliki pustakawan

dengan kualifikasi pendidikan minimal D2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi atau guru berkualifikasi S1 yang sudah mengikuti diklat perpustakaan; 2). pengelolaan perpustakaan dilakukan secara profesional oleh SDM yang kompeten; 3). Koleksinya terus meningkat baik kualitas, kuantitas dan jenis/variasinya; 4). mengembangkan *entrepreneurship* (wirausaha) untuk meningkatkan pendanaan. Sedangkan menurut UU RI No. 43 tahun 2007 bab III pasal 11 ayat 1, perpustakaan yang ideal adalah yang mengacu kepada SNP yang meliputi: standar sarana dan prasarana; standar koleksi perpustakaan; standar pelayanan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai, dan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di 9 propinsi yaitu di Jabar; Jatim; Jateng; Sumut, NTB; Kalsel, Kalbar, NTT dan Maluku, dengan waktu penelitian selama 8 bulan (Maret-November 2013).

Populasi sampling penelitian ini adalah seluruh MA yang ada di 9 propinsi tersebut. Sedangkan populasi target/sasarannya adalah seluruh MA terakreditasi A, B dan C di 9 propinsi tersebut yang berjumlah 2.705 MA (MA akreditasi A sebanyak 650 (24,3%); MA akreditasi B sebanyak 1.413 (52%); MA akreditasi C sebanyak 642 (23,7%). Jumlah MA sasaran penelitian ditentukan dengan rumus Slovin dengan *Margin of Error* (MoE) 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Dari 2.705 MA di 9 propinsi tsb, diperoleh jml MA sebanyak 250 MA (61 MA akreditasi A; 130 MA akreditasi B; 59 MA akreditasi C). Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *multistage random sampling*.

Responden penelitian per MA sebanyak 7 orang (1 orang kepala perpustakaan/pustakawan, 1 orang pegawai/tenaga teknis, 1 orang kepala madrasah, 2 orang pendidik dan 2 orang peserta didik). Dari 250 MA,

¹¹ Andi Prastowo, *Op Cit*, h. 33.

¹² Sri Marmoah, 2009, *Problematika Perpustakaan Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah*, *Jurnal Tenaga Kependidikan*, Vol. 4, No. 1, h. 68-71

jumlah responden seluruhnya adalah 7 orang x 250 MA = 1.750 orang. Instrumen/ alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner, daftar isian dan dokumen. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk menjaring data kuantitatif. Sedangkan penyebaran daftar isian dan studi dokumen untuk menjaring data pendukung. Untuk memperdalam analisis, juga dilakukan wawancara terhadap beberapa responden.

Data yang telah terkumpul dari penelitian dianalisa dengan teknik deskriptif statistik, yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Untuk mengetahui seberapa tingkat keterpenuhan perpustakaan MA terhadap Standar Nasional Perpustakaan (SNP), hasil penilaian dikategorikan menjadi lima kategori mengacu pada pengkategorian yang digunakan oleh BSNP sbb:

Tabel 1:
Kategori Penilaian

No	Persentase (%) Rentang Nilai	Kualifikasi	Kategori
1	91 - 100	A	Sangat baik/sangat memenuhi SNP
2	76 - 90	B	Baik / memenuhi SNP
3	60 - 75	C	Cukup baik / cukup memenuhi SNP
4	51 - 59	D	Kurang baik/kurang memenuhi SNP
5	0- 50	E	Sangat kurang baik/sangat kurang memenuhi SNP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kepala MA

Untuk mengetahui kebijakan kepala MA, pengumpulan data dilakukan melalui 250 orang kepala MA (231 orang laki-laki dan 19 orang perempuan) sebagai responden, dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 100 orang, S1 sebanyak 141 orang, diploma sebanyak 4 orang dan berpendidikan SLTs sebanyak 5 orang. Melalui 250 orang responden tersebut, diperoleh hasil bahwa sebagian besar MA/sebanyak 232 MA telah memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan (128 MA memiliki kebijakan tertulis baik berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi dan disposisi; serta 106 MA

memiliki kebijakan tidak tertulis berbentuk arahan dalam penyelenggaraan perpustakaan MA). Dilihat dari tahun dikeluarkannya kebijakan tertulis tersebut, sebanyak 71 MA mengeluarkan kebijakan sebelum tahun 2010, 66 MA mengeluarkan kebijakan tahun 2010, 47 MA mengeluarkan kebijakan tahun 2011 dan 48 MA mengeluarkan kebijakan tahun 2012.

Masih banyaknya MA yang belum memiliki kebijakan tertulis (baru memiliki kebijakan tidak tertulis) ini menurut sebagian kepala MA karena penyelenggaraan perpustakaan di MA belum menjadi skala prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun keberadaan perpustakaan memiliki peranan penting sebagai sumber belajar, namun karena pengembangan aspek lain seperti sarana prasarana pendidikan (ruang kelas, ruang kepala, ruang guru dan ruang kantor serta alat bantu belajar); pengembangan SDM (pendidik dan tenaga kependidikan); pengembangan kurikulum; proses pembelajaran dan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sehingga aspek-aspek tersebut lebih diutamakan dan menjadi skala4 prioritas dalam pengembangan pendidikan di madrasah.

Sedangkan dilihat dari isi kebijakannya, masing-masing MA memiliki kebijakan yang berbeda-beda, sebanyak 53 MA memiliki kebijakan yang sangat mendukung penyelenggaraan perpustakaan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 10% dari anggaran yang ada, sebanyak 118 MA memiliki kebijakan yang mendukung penyelenggaraan perpustakaan dengan mengalokasikan anggaran kurang dari 10% dari anggaran yang ada, dan sebanyak 61 MA memiliki kebijakan yang mendukung penyelenggaraan perpustakaan, namun belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk penyelenggaraan perpustakaan, karena kebijakan yang diberikan baru sebatas ucapan, arahan, support dan motivasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Bagi perpustakaan MA yang belum memiliki anggaran khusus tersebut bahwa

sebenarnya MA sangat menginginkan adanya perpustakaan yang ideal yang memiliki sarana prasarana memadai, sehingga mampu membantu peserta didik dan pendidik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Namun MA tersebut belum memiliki anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan secara khusus. Anggaran yang ada selama ini baru terkonsentrasi untuk biaya operasional pendidikan. Bahkan beberapa MA untuk biaya operasional saja masih jauh dari mencukupi. Akibat dari ketiadaan anggaran ini, sehingga keberadaan perpustakaan MA belum mampu menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai sarana sumber belajar peserta didik dan juga sumber informasi pendidik.

Hasil penelitian terhadap kebijakan pengembangan SDM, menunjukkan bahwa sebanyak 103 MA memiliki kebijakan tertulis dan 114 MA memiliki kebijakan tidak tertulis. Dilihat dari tahun dikeluarkannya kebijakan tertulis tersebut, sebanyak 42 MA mengeluarkan kebijakan sebelum tahun 2010, 58 MA mengeluarkan kebijakan tahun 2010, 58 MA mengeluarkan kebijakan tahun 2011 dan 60 MA mengeluarkan kebijakan tahun 2012. Sedangkan dilihat dari isi kebijakannya, 13 MA memiliki kebijakan dalam meningkatkan kualifikasi tenaga perpustakaan dengan memberikan bantuan biaya studi lanjutan; 165 MA memiliki kebijakan meningkatkan kompetensi dengan mengikuti dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi dan diklat, 51 MA memiliki kebijakan dalam meningkatkan karier melalui promosi jabatan, 41 MA memiliki kebijakan meningkatkan kesejahteraan SDM melalui pemberian honor, hadiah dsb.

Hasil penelitian terhadap kebijakan pengembangan sarana prasarana perpustakaan, menunjukkan bahwa sebanyak 109 MA memiliki kebijakan tertulis dan 111 MA memiliki kebijakan tidak tertulis. Dilihat dari tahun dikeluarkannya kebijakan tersebut, sebanyak 66 MA memiliki kebijakan yang

dikeluarkan sebelum tahun 2010, sebanyak 48 MA mengeluarkan kebijakan tahun 2010, sebanyak 49 MA mengeluarkan kebijakan tahun 2011 dan 57 MA mengeluarkan kebijakan tahun 2012. Sedangkan dilihat dari isi kebijakannya, sebanyak 77 MA memiliki kebijakan dengan mengalokasikan anggaran tersendiri untuk melakukan pengembangan sarana prasarana, sebanyak 71 MA memiliki kebijakan dengan melakukan kerjasama dengan institusi/pihak lain terkait dan 98 MA memiliki kebijakan dengan melibatkan komite madrasah dalam melakukan pengembangan sarana prasarana.

Sedangkan penelitian terhadap kepemilikan dan sumber pendanaan perpustakaan MA, hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 70 MA memiliki sumber pendanaan dari APBN dengan jumlah total Rp. 1.935.956.000; sebanyak 7 MA memiliki sumber dari APBD dengan jumlah total Rp. 368.950.000; sebanyak 53 MA memiliki sumber dari orangtua peserta didik dengan jumlah total Rp. 672.307.500 dan sebesar 14 MA memiliki sumber dari masyarakat luas dengan jumlah total Rp. 166.910.000. Sedangkan dilihat dari ketercukupannya; sebanyak 102 MA telah tercukupi pendanaannya sebesar antara 1-35%; sebanyak 25 MA tercukupi sebesar 36-70% dan sebanyak 5 MA tercukupi sebesar 71-100%. Hasil penelitian juga menunjukkan sebanyak 119 MA tidak/belum memiliki pendanaan untuk operasional perpustakaan.

Tujuan dan Fungsi Perpustakaan

Untuk dapat mengetahui apakah perpustakaan telah menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik, penelitian dilakukan dengan melihat sembilan belas indikator seperti perpustakaan mengadakan program pengembangan kebiasaan dan minat baca peserta didik melalui kegiatan wajib kunjung perpustakaan; lomba menulis karya ilmiah; lomba menulis majalah dinding; lomba menulis cerita fiksi dan non fiksi; program bimbingan menulis kreatif; program peningkatan jenis dan jumlah sumber belajar peserta didik dan pedoman pendidik sebesar 10%/tahun;

penyediaan dan pengkondisian ruang baca yang nyaman; penyediaan dan pengkondisian ruang penelitian yang nyaman dan penyediaan bahan penelitian literatur yang memadai; memberikan informasi yang lengkap, mudah, cepat dan akurat; melakukan tertip administrasi dan menyusun tata tertip kerja.

Penelitian yang dilakukan terhadap 250 perpustakaan MA, hasilnya menunjukkan bahwa baru 109 atau sekitar 43,9% perpustakaan MA yang telah menjalankan tujuan dan fungsi perpustakaan dengan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar perpustakaan MA (54,1%) belum mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik.

Kondisi perpustakaan MA yang demikian, karena perpustakaan MA belum memiliki sebagian program-program sebagaimana diuraikan. Diantara sembilanbelas indikator tujuan dan fungsi perpustakaan MA yang diteliti, indikator terbaik terlihat pada kemampuan perpustakaan MA dalam pengembangan kebiasaan dan minat baca bagi peserta didik melalui kegiatan wajib kunjung perpustakaan minimal 1 jam perminggu perkelas dan program tertib administrasi dengan melakukan pencatatan seluruh koleksi perpustakaan mencakup jumlah, jenis dan perkembangannya, dengan frekuensi masing-masing 178 dan 199 perpustakaan MA. Adapun indikator yang paling kurang baik adalah kemampuan perpustakaan MA dalam pengembangan program peningkatan jenis dan jumlah sumber pedoman pendidik dan peningkatan jenis dan jumlah sumber pengetahuan sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ada serta program penyediaan ruang penelitian yang nyaman.

Masih lemahnya kemampuan perpustakaan MA melakukan pengembangan program-program perpustakaan tersebut, menurut para kepala perpustakaan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain terbatasnya SDM perpustakaan baik secara kualitas maupun kuantitas, terbatasnya anggaran

perpustakaan, lemahnya kebijakan kepala MA dalam mendukung keberadaan perpustakaan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tujuan dan fungsinya, perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan 43,9%. Ini berarti masih sekitar 56,1% perpustakaan MA yang belum memenuhi SNP dilihat dari tujuan dan fungsinya.

Kondisi Tenaga Perpustakaan MA

Dari hasil penelitian terhadap 250 perpustakaan MA diketahui bahwa jumlah keseluruhan tenaga Perpustakaan MA sasaran penelitian sebanyak 536 orang yang terdiri dari 256 orang laki-laki dan 280 orang perempuan. Dilihat dari jabatannya, sebanyak 178 orang sebagai kepala perpustakaan; 112 orang pustakawan; 84 orang tenaga teknis perpustakaan dan 162 orang pegawai administrasi perpustakaan. Dilihat dari status kepegawaiannya, sebanyak 61 orang sebagai PNS dan 475 orang non PNS. Sedangkan dilihat dari pendidikannya, sebanyak 29 orang merupakan sarjana bidang perpustakaan/sarjana non perpustakaan namun telah memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan; 18 orang berpendidikan Diploma bidang perpustakaan/sarjana non perpustakaan namun telah memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan; 40 orang berpendidikan SLTA dan telah memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan; 136 orang berpendidikan sarjana non perpustakaan dan belum memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan; 135 orang berpendidikan Diploma non perpustakaan dan belum memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan; 67 orang berpendidikan SLTA dan belum memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar (168 perpustakaan MA) rata-rata memiliki jumlah tenaga perpustakaan

sebanyak dua orang atau lebih. Dilihat dari rerata jumlah tenaga perpustakaan yang dimiliki perpustakaan MA sebanyak 2 orang, dapat dikatakan bahwa perpustakaan telah memenuhi SNP dan masuk kategori cukup memenuhi dengan tingkat keterpenuhan sebesar 67,2%. Ini sesuai dengan ketentuan SNP No. 009 tahun 2011 dan Permendiknas No. 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan, yang salah satunya mensyaratkan jumlah tenaga perpustakaan minimal 2 orang bila memiliki jumlah rombongan 3-6 dengan jumlah rata-rata peserta didik 0-150 orang dan memiliki koleksi perpustakaan 100-500 buku teks wajib.

Sedangkan dilihat dari pendidikannya, kondisi tenaga perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi, karena hanya 38 orang (15,2%) tenaga perpustakaan MA yang memiliki pendidikan sesuai dengan SNP.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat jumlah kepemilikan ketenagaan dan pendidikannya, kondisi tenaga perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan sebesar 50,8%.

Sarana Prasarana Perpustakaan MA

Penelitian terhadap sarana prasarana perpustakaan MA, dilakukan melalui 250 pegawai/tenaga teknis perpustakaan MA sebagai responden yang terdiri dari 123 laki-laki dan 127 orang perempuan. Dilihat dari pendidikannya, sebanyak 86 orang berpendidikan SLTA, 115 orang berpendidikan Diploma, 131 orang berpendidikan S1 dan 4 orang berpendidikan S2. Dari 250 responden tersebut, sebanyak 30 orang telah memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan.

Untuk mengetahui kondisi sarana prasarana perpustakaan, penelitian dilakukan melalui empat indikator yaitu posisi/letak perpustakaan; luas perpustakaan; jenis, keberadaan dan kondisi area/ruang

perpustakaan (ruang kerja, koleksi, baca, referensi, serbaguna, tamu, penelitian, multimedia dan gudang); jumlah, keberadaan dan kondisi kelengkapan perpustakaan; jenis dan jumlah koleksi bahan pustaka.

Dilihat dari posisi/letaknya, perpustakaan MA telah memenuhi SNP dan masuk kategori memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan sebesar 81,2%. Sesuai SNP No. 009 Tahun 2011 Tentang Perpustakaan MA bahwa lokasi perpustakaan madrasah harus strategis yakni berada di pusat kegiatan pembelajaran, mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, terjamin ketenangan dan keamanan.

Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang memiliki lokasi yang strategis, yakni mudah terjangkau oleh para pengunjung, baik oleh peserta didik, pendidik maupun karyawan lainnya. Jika memungkinkan, sebaiknya lokasi perpustakaan terpusat atau sentral, tidak di lantai atas yang menyebabkan peserta didik, pendidik maupun karyawan enggan mengunjunginya. Perpustakaan sebaiknya juga memiliki akses dan kedekatan dengan semua kawasan pengajaran. Faktor kebisingan diminimalkan dan dijaga keamanan dan kenyamanannya. Karena perpustakaan MA merupakan jantungnya madrasah, maka selayaknya perpustakaan haruslah tepat berada ditengah-tengah peserta didik, pendidik maupun karyawan tata usaha yang merupakan komunitas yang dilayaninya.

Sedangkan dilihat dari luasnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan 38%. Menurut SNP No. 009 Tahun 2011 Tentang Perpustakaan MA disebutkan bahwa perpustakaan menyediakan prasarana gedung/ruang perpustakaan dengan ketentuan bila memiliki 3-6 rombongan seluas 112 M²; bila memiliki 7-12 rombongan seluas 168 M²; bila memiliki 13-18 rombongan seluas 224 M²; dan bila memiliki 19-27 rombongan seluas 280 M².

Dilihat dari jumlah rombelya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari 250 MA sasaran penelitian, sebagian besar MA atau 56,8% memiliki 3-6 rombel; 27,6% memiliki 6-12 rombel dan 15,6% memiliki > 12 rombel. Dengan jumlah rombel berkisar antara 3-6 rombel seharusnya rata-rata MA memiliki perpustakaan dengan luas minimal 112 M². Namun hasil penelitian justru menunjukkan bahwa hanya 95 MA atau sekitar 38% yang memiliki perpustakaan dengan luas 112 M² atau lebih dan sekitar 62% memiliki perpustakaan dengan luas kurang dari 112 M². Ini artinya bahwa dilihat dari rata-rata jumlah rombel yang dimiliki MA dan dibandingkan dengan rata-rata luas perpustakaan MA, dapat dikatakan bahwa perpustakaan MA belum memenuhi SNP.

Masih sedikitnya MA yang memiliki perpustakaan dengan luas kurang memadai ini menurut sebagian kepala perpustakaan, karena pengadaan perpustakaan belum didukung oleh pendanaan yang memadai dengan membangun gedung tersendiri, sehingga perpustakaan MA umumnya hanya menempati ruang kelas yang diseting untuk perpustakaan atau bahkan menempati ruang tertentu yang luasnya tidak memadai. Karena pengadaan perpustakaan tidak dilakukan dengan membangun gedung tersendiri, sehingga keberadaan perpustakaan masih jauh dari persyaratan SNP. Perpustakaan MA umumnya belum memiliki ruang-ruang tertentu yang memadai baik dari segi jenis, jumlah, luas maupun kenyamanannya. Kondisi perpustakaan yang demikian, sehingga kurang mampu menarik minat peserta didik untuk memanfaatkan perpustakaan tersebut.

Dilihat dari jenis dan kondisi area/ruang yang dimiliki perpustakaan MA, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan 35,2%. Karena dari 250 perpustakaan MA yang diteliti, hanya 88 perpustakaan MA atau sekitar 35,2% yang memiliki seluruh jenis area/

ruang yang dibutuhkan dalam perpustakaan. Dalam SNP No. 009 Tahun 2011 Tentang Perpustakaan MA disebutkan bahwa area gedung perpustakaan madrasah setidaknya meliputi area koleksi; area baca; area kerja; area serbaguna; area multimedia dan gudang. Ini artinya bahwa masih sekitar 64,8% MA yang belum memiliki area gedung perpustakaan madrasah sebagaimana diuraikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perpustakaan MA masih belum memadai. Padahal perpustakaan yang ideal salah satunya adalah yang memiliki ruangan/area yang tidak saja nyaman, tetapi juga harus lengkap, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penggunanya. Perpustakaan yang ideal paling tidak memiliki ruangan sebagaimana disebutkan di atas yakni terdiri dari ruang kerja, ruang koleksi, ruang baca, ruang referensi, ruang serbaguna, ruang tamu, ruang penelitian, ruang serbaguna dan ruang gudang. Jika seluruh ruang ini terpenuhi baik dari segi keberadaan dan kondisinya yang memadai, maka perpustakaan akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik yakni keberadaannya memberikan manfaat bagi pengunjung, mampu memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pengunjung karena pengunjung terfasilitasi dan terpenuhi kebutuhannya dengan baik dan mampu melaksanakan kegiatan keperustakaan dengan baik yakni kegiatan pengelolaan maupun pelayanan.

Dilihat dari keberadaan sarana perlengkapan perpustakaan MA, hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan MA saat ini belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan baru sekitar 24,8%. Ini artinya bahwa sebagian besar perpustakaan MA yakni sekitar 75,2% belum memiliki sarana perlengkapan perpustakaan sesuai SNP. Salah satu indikator perpustakaan ideal adalah perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana kelengkapan yang memadai. Dalam SNP No. 009 Tahun 2011 Tentang Perpustakaan SMA/MA disebutkan bahwa sarana perlengkapan

yang harus disediakan perpustakaan MA sekurang-kurangnya meliputi: a) Rak buku (15 buah); b) Rak majalah (1 buah); c) Rak surat kabar (1 buah); d) Meja baca (15 buah); e) Kursi baca (30 buah); f) Kursi kerja (3 buah); g) Meja kerja (3 buah); h) Lemari katalog (1 buah); i) Lemari (2 buah); j) Papan pengumuman (1 buah); k) Meja sirkulasi (1 buah); l) Majalah dinding (1 buah); m) Rak buku referensi (2 buah); n) Perangkat komputer dan mejanya untuk keperluan administrasi (1 buah); o) Perangkat komputer, meja dan fasilitas akses internet untuk keperluan pemustaka (2 buah); p) Perangkat komputer, meja dan fasilitas katalog publik online untuk keperluan pemustaka (1 buah); q) TV (1 buah); r) Pemutar VCD/DVD (1 buah); s) Tempat sampah (3 buah); t) Jam dinding (2 buah).

Dari sekitar sekitar 24,8% perpustakaan MA yang belum memenuhi SNP tersebut, sebenarnya mereka dalam kondisi memiliki beberapa perlengkapan perpustakaan, namun dari keseluruhan jumlah dan jenis yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan SNP, perpustakaan MA belum memiliki.

Dari empat indikator yang dilihat dalam penelitian terhadap sarana prasarana perpustakaan MA yang meliputi posisi/letak perpustakaan; luas perpustakaan; keberadaan, kondisi dan jenis area/ruangan perpustakaan; jenis dan kondisi kelengkapan perpustakaan, dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan sebesar 40,8%. Pada indikator posisi/letak perpustakaan memiliki tingkat keterpenuhan sebesar 81,2%; pada indikator luas perpustakaan memiliki tingkat keterpenuhan sebesar 38%, pada indikator jenis area/ruang perpustakaan memiliki tingkat keterpenuhan sebesar 35,2% dan pada indikator kelengkapan sarana prasarana memiliki tingkat keterpenuhan 24,8%.

Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan MA

Penelitian terhadap koleksi bahan pustaka dilakukan melalui empat indikator yaitu kepemilikan buku pelajaran wajib, buku panduan pendidik, buku pengayaan dan bahan pustaka non buku. Dari empat indikator tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 250 perpustakaan MA, sebanyak 70,8% perpustakaan MA telah memiliki buku teks pelajaran wajib; sebanyak 50,4% perpustakaan MA telah memiliki buku panduan pendidik; sebanyak 79,2% perpustakaan MA telah memiliki buku pengayaan dan sebanyak 34% perpustakaan MA memiliki bahan pustaka non buku. Ini artinya bahwa perpustakaan MA dilihat dari kepemilikan buku teks pelajaran wajib *telah memenuhi SNP* dan masuk kategori *memenuhi* dengan tingkat keterpenuhan 70,8%; dilihat dari kepemilikan buku panduan pendidik *belum memenuhi SNP* dan masuk kategori *kurang memenuhi* dengan tingkat keterpenuhan 50,4%; dilihat dari kepemilikan buku pengayaan *telah memenuhi SNP* dan masuk kategori *memenuhi* dengan tingkat keterpenuhan 79,2%; dan dilihat dari kepemilikan bahan pustaka non buku *belum memenuhi SNP* dan masuk kategori *sangat kurang memenuhi* dengan tingkat keterpenuhan 34%.

Dari empat indikator yang dilihat dalam penelitian tentang koleksi bahan pustaka yaitu buku teks pelajaran wajib (70,8% memenuhi SNP); buku panduan pendidik (50,4% memenuhi SNP); buku pengayaan (79,2% memenuhi SNP) dan bahan pustaka non buku (34,0% memenuhi SNP), hasilnya menunjukkan bahwa koleksi bahan pustaka perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori kurang memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan 58,6%.

Pelayanan Perpustakaan MA

Untuk mengetahui bagaimana pelayanan perpustakaan di MA, penelitian dilakukan terhadap empat indikator pelayanan yaitu prinsip pelayanan; teknik pelayanan; kualitas pelayanan dan jenis pelayanan.

Hasil penelitian terhadap empat indikator tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori kurang memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 52,5%.

Hasil ini memperlihatkan bahwa dalam melakukan pelayanan, perpustakaan MA masih menghadapi banyak kendala antara lain perpustakaan belum mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, belum memiliki teknik pelayanan yang baik dan belum mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik yang mampu memberikan kepuasan pengunjung. Kelemahan ini terjadi karena banyak faktor antara lain dalam melakukan pelayanan perpustakaan MA belum didukung oleh sarana prasarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah pada sistem otomatisasi perpustakaan atau *electronic library*. Karakteristik layanan perpustakaan yang baik ini dapat dirangkum dalam akronim *comfort*, yaitu *caring* (peduli), *observant* (suka memperhatikan), *mindful* (hati-hati/cermat), *friendly* (ramah), *obliging* (bersedia membantu), *responsible* (tanggung jawab), dan *tacful* (bijaksana).

Untuk mewujudkan hal di atas layanan otomatisasi perpustakaan merupakan suatu keniscayaan. Biaya bukanlah penghalang karena saat ini sudah ada program otomatisasi perpustakaan yang bersifat *open source*, seperti PS Senayan. Selain itu, perpustakaan perlu meningkatkan ragam layanan perpustakaan.

Ragam layanan ini antara lain, *pertama*, membentuk klub pembaca. Perpustakaan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok pembaca, klub buku, kelompok penggemar buku, maupun kelompok diskusi berdasarkan selera pembaca terhadap buku-buku tertentu. *Kedua*, membentuk klub penulis. Pembukaan layanan khusus tentang kepenulisan ini sangat penting, mengingat budaya menulis merupakan tindak lanjut dari budaya membaca yang menjadi misi perpustakaan. *Ketiga*, membuka layanan *lifeskill/kecakapan hidup*. Hal ini dapat ditempuh dengan membuka aneka kursus dan

bimbingan di perpustakaan. Kursus komputer, bahasa Inggris, jarimatika/sempoa, dan elektronika akan menjadi menu layanan yang menyenangkan di perpustakaan. Disamping itu, bimbingan belajar, menulis karya ilmiah, menulis cerita, bimbingan penelitian dsb, akan mampu menambah keterampilan pemustaka dan juga merupakan bentuk layanan yang menarik dan menyenangkan. *Keempat*, membuka layanan hotspot, yang memberi akses internet gratis akan memudahkan pemustaka untuk mendapatkan informasi secara optimal di perpustakaan. *Kelima*, membentuk klub blogger. Saat ini aktivitas "ngeblog" sudah cukup menjamur di tanah air. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah blogger yang cukup banyak. *Keenam*, membuka layanan perpustakaan secara online. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat blog perpustakaan di dunia maya. Blog perpustakaan ini merupakan salah satu media yang cukup murah-meriah untuk membentuk jaringan kerjasama antar perpustakaan. *Ketujuh*, membuka layanan galeri seni budaya. Perpustakaan dapat menjadi salah satu pusat kebudayaan masyarakat dengan menggelar secara periodik seni tari, musik, teater, mendongeng (*story telling*) dan puisi.

Penyelenggaraan Perpustakaan MA

Untuk mengetahui penyelenggaraan perpustakaan MA, penelitian dilakukan terhadap dua indikator yaitu pembangunan/pembentukan gedung dan pembinaan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori kurang memenuhi, dengan tingkat pemenuhan sekitar 50,4%. Dari 250 perpustakaan MA sasaran penelitian, sebanyak 126 perpustakaan MA telah memenuhi SNP dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Pengelolaan MA

Penelitian terhadap pengelolaan perpustakaan MA, dilakukan terhadap lima indikator yaitu pengelolaan SDM, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan pendanaan, pengelolaan koleksi bahan pustaka dan pengelolaan pelayanan perpustakaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan MA telah memenuhi SNP dan masuk kategori cukup memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan sebesar 60,8%. Dari 250 perpustakaan MA, sebanyak 151 perpustakaan MA telah memenuhi SNP dalam pengelolaan perpustakaan. ini artinya bahwa masih sekitar 39,2% perpustakaan MA yang belum memenuhi SNP.

Meskipun indikator pengelolaan tersebut telah memenuhi SNP, namun sesungguhnya tingkat keterpenuhannya belumlah maksimal, karena masih sekitar 39,2% MA yang belum memenuhi SNP. Kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan ini terlihat pada hampir seluruh indikator. Pada indikator pengelolaan SDM, perpustakaan MA belum mampu menghadirkan tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai. Hasil penelitian menunjukkan baru sekitar 41,7% perpustakaan MA yang memiliki ketenagaan dengan kualifikasi dan kompetensi memadai. Pada indikator pengelolaan sarana prasarana, baru sekitar 40,4% perpustakaan MA yang memiliki sarana prasarana memadai. Pada indikator pengelolaan pendanaan, masih sekitar 34,4% perpustakaan MA yang sama sekali belum memiliki pendanaan. Pada indikator pengelolaan koleksi bahan pustaka, baru sekitar 58,6% MA yang memiliki koleksi yang memadai. Sedangkan pada indikator pengelolaan pelayanan, baru sekitar 52,5% yang mampu memberikan pelayanan yang baik.

Melihat kondisi ini, perpustakaan MA masih harus bekerja keras untuk dapat melakukan pengelolaan perpustakaan dengan baik. Pengelolaan perpustakaan yang ideal setidaknya kelima indikator tersebut memenuhi SNP secara maksimal. Untuk memperbaiki ketenagaan, perpustakaan MA harus melakukan peningkatan kualifikasi

dan kompetensi melalui berbagai cara atau melakukan rekrutmen ulang secara benar. Untuk memperbaiki sarana prasarana, harus melakukan perbaikan dan penambahan dengan cara pengadaan atau kerjasama dengan instansi terkait. Untuk memperbaiki pendanaan, harus meningkatkan sumber-sumber pendanaan dengan bekerjasama dengan instansi terkait, komite madrasah, yayasan dan masyarakat luas. Untuk meningkatkan koleksi dapat melakukan pengadaan dengan berbagai cara seperti penyusunan program pengadaan koleksi secara rutin setiap tahun melalui anggaran tersendiri, bekerjasama dengan pihak lain melalui hibah/pemberian, dsb. untuk memperbaiki pelayanan, juga harus melengkapi sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan memperbaiki sistem pelayanan yang lebih baik.

Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) MA

Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Madrasah Aliyah (SNP MA) yang dimaksud disini adalah kondisi perpustakaan MA dilihat melalui berbagai variabel dan indikatornya seperti tujuan dan fungsinya; tenaga perpustakaan/SDM nya; sarana prasarananya; koleksi bahan pustakanya, pelayanannya; penyelenggaraannya dan pengelolaannya, telah sesuai dengan ketentuan SNP.

Dari hasil penelitian terhadap keseluruhan variabel dan indikator tentang perpustakaan MA tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 49,6%. Ini berarti masih sekitar 50,4% perpustakaan MA yang belum memenuhi SNP.

Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) MA Berdasarkan Status MA (Negeri dan Swasta)

Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Madrasah Aliyah (SNP MA) berdasarkan

status (Negeri dan Swasta), dapat disimpulkan bahwa perpustakaan MAN telah memenuhi SNP dan masuk kategori memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan 70,8% dan pemenuhan SNP MAS belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 44,5%.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemenuhan SNP MAN dan MAS. Pemenuhan SNP MAN terlihat jauh lebih baik dibanding dengan pemenuhan SNP MAS. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan SNP MAS antara lain masih banyaknya MAS yang belum memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan, sehingga disamping belum mampu memenuhi standar, juga memiliki pendanaan yang kurang memadai. Sekitar 40,6% MAS belum memiliki kebijakan tertulis. Sementara MAN, sekitar 62,5% telah memiliki kebijakan tertulis. Dukungan pendanaan MAS juga masih rendah. sebanyak 58,4% MAS belum memiliki dukungan pendanaan bagi perpustakaan. Sementara perpustakaan MAN seluruhnya telah memiliki pendanaan tersendiri baik melalui APBN, APBD maupun orangtua peserta didik.

Deskripsi Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Madrasah Aliyah (SNP MA) Berdasarkan Akreditasi (A, B, C).

Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Madrasah Aliyah (SNP MA) berdasarkan akreditasi (A, B, C), dapat disimpulkan bahwa perpustakaan MA akreditasi A telah memenuhi SNP dan masuk kategori cukup memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan 64,3% . MA akreditasi B dan C belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan masing-masing 44,5% dan 44,2%.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pemenuhan SNP MA akreditasi A, dengan MA akreditasi B dan C. Pemenuhan SNP pada MA akreditasi A terlihat jauh lebih baik dibanding dengan pemenuhan SNP pada MA akreditasi B dan C. Ini

artinya bahwa perbedaan akreditasi ternyata berpengaruh terhadap pemenuhan SNP di MA. Pada MA akreditasi A, kondisi perpustakaan telah memenuhi SNP dan masuk kategori cukup memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 64,3%. Sedangkan pada MA akreditasi B, kondisi perpustakaan belum memenuhi SNP dan masuk kategori kurang memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 50%. Begitu juga pada MA akreditasi C, kondisi perpustakaan juga belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 38,5%.

Faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan SNP pada MA akreditasi B dan C antara lain masih banyaknya MA akreditasi B dan C yang belum memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan, sehingga keberadaan perpustakaan belum mendapat dukungan yang maksimal dari kepala madrasah terutama terkait dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM. Bagaimana kebijakan kepala MA akreditasi A, B, C, dapat dilihat dalam tabel berikut. Sebanyak 55,7% MA akreditasi A telah memiliki kebijakan kepala secara tertulis. Sementara MA akreditasi B, baru sekitar 43,7% yang memiliki kebijakan kepala secara tertulis dan MA akreditasi C baru sekitar 32,7. Sedangkan dukungan pendanaan, sebanyak 62,5% MA akreditasi A telah memiliki pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, orangtua siswa. Sementara MA akreditasi B baru sekitar 43,8% yang memiliki pendanaan yang bersumber dari empat unsur tersebut dan MA akreditasi C baru sekitar 48%.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian tentang “*Studi Perpustakaan Madrasah (Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan di Madrasah Aliyah)*”, hasilnya menunjukkan bahwa perpustakaan MA belum memenuhi SNP dan masuk kategori sangat kurang memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 49,6%.

Dari tujuh variabel yang diteliti (tujuan dan fungsi perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar sarana prasarana perpustakaan, standar koleksi perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan dan standar pengelolaan perpustakaan), hanya satu variabel yang telah memenuhi SNP yaitu standar pengelelolaan, telah mencapai kategori cukup memenuhi dengan tingkat keterpenuhan 60,8%. Sedangkan variabel yang paling rendah tingkat keterpenuhannya ada tiga vaiabel yaitu standar sarana prasarana, standar tenaga perpustakaan dan tujuan dan fungsi perpustakaan. Ketiganya masuk kategori sangat kurang memenuhi. Adapun tiga variabel lainnya yaitu standar koleksi bahan pustaka, standar pelayanan, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan, juga belum memenuhi SNP dan masuk kategori kurang memenuhi.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab belum terpenuhinya standar nasional perpustakaan di MA antara lain kebijakan kepala madrasah terhadap penyelenggaraan perpustakaan yang belum maksimal, yang terlihat dari masih banyaknya MA yang belum memiliki kebijakan tersebut terutama kebijakan tertulis. Sebagian MA yang telah memiliki kebijakan tidak tertulis, sifatnya baru berupa arahan dan dukungan moril. Dukungan dalam bentuk materil, berupa dukungan pendanaan dengan alokasi anggaran tersendiri untuk penyelenggaraan perpustakaan masih sangat kurang.

Saran-saran

1. Dirjen Pendis kementerian Agama selaku instansi yang berwenang melakukan pembinaan terhadap madrasah, sebaiknya segera dilakukan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas perpustakaan menuju “Perpustakaan Berstandar Nasional”, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembinaan yang intensif terhadap pengelola perpustakaan

sehingga meningkat pengetahuan dan keterampilannya dalam mengelola perpustakaan MA, melalui pendidikan lanjutan yang sesuai dengan bidangnya (bidang studi perpustakaan).

- b. Mengalokasikan anggaran tersendiri bagi penyelenggaraan perpustakaan melalui APBN, sehingga perpustakaan memiliki anggaran yang memadai.
 - c. Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan secara kualitas dan kuantitas, baik berupa sarana gedung, perabot, dan sarana penunjang berbasis teknologi dan infoprmasi untuk memperlancar penyelenggaraan dan pelayanan bagi pengunjung.
 - d. Meningkatkan koleksi bahan pustaka baik dari segi kualitas maupun jumlah dan jenisnya, tidak terbatas pada koleksi buku semata, tetapi juga koleksi dalam bentuk non buku seperti koleksi bahan pustaka rekam, pandang dengar, audio visual, majalah, koran dsb.
 - e. Melakukan rekrutmen tenaga perpustakaan melalui seleksi yang benar dengan melihat pada kualifikasi dan kompetensi, untuk memenuhi kekurangan ketenagaan baik secara kualitas maupun kuantitas.
 - f. Pengadaan tenaga perpustakaan sebaiknya dilakukan melalui SK pengangkatan tersendiri sebagaimana layaknya pengangkatan CPNS lainnya.
 - g. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengusulan akreditasi perpustakaan.
2. Pusdiklat Teknis

Mengingat masih rendahnya kompetensi sebagian besar tenaga perpustakaan, sebaiknya mengadakan diklat tentang pengelolaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan MA, untuk meningkatkan kompetensinya dan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti bahwa mereka telah memiliki kompetensi

dalam mengelola perpustakaan, dengan biaya gratis/ditanggung Kemenag (melalui anggaran Pusdiklat).

3. Kepala MA

Mengingat masih rendahnya kualitas perpustakaan MA, sebaiknya kepala MA memberikan perhatian yang serius dalam penyelenggaraan perpustakaan dengan memberikan kebijakan secara tertulis baik mengenai dukungan penyelenggaraan, pengelolaan, dukungan sarana, dukungan pendanaan, dukungan ketenagaan dsb.

4. Tenaga Perpustakaan

Untuk lebih meningkatkan kompetensi, sebaiknya seluruh tenaga perpustakaan berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan banyak membaca berbagai literatur yang mendukung dan mengikuti berbagai diklat, seminar, workshop dsb.

Ucapan Terima Kasih

1. Penelitian ini merupakan penelitian nasional yang dilakukan di 9 provinsi. Pengumpulan data dilakukan oleh tim peneliti sebanyak 28 orang. Saya (Umul Hidayati) selaku kordinator yang menulis artikel ini mengucapkan terima kasih kepadaseluruh timpengumpul data atas kerjasamanya dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, sehingga penelitian ini berjalan lancar.
2. Kepada seluruh responden yang telah membantu kelancaran penelitian ini juga kami ucapkan terima kasih.

SUMBER BACAAN

- Bafadal, Ibrahim (2011): *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.VIII.
- Milburga, Larasati, dkk (1991): *Membina Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Marmoah, Sri (2009): *Problematika Perpustakaan Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jurnal Tenaga Kependidikan, Vol. 4, No. 1

Prastowo, Andi (2012): *Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional*, Jogjakarta: Diva Press.

Pratama, Admin, dalam sebuah artikelnya berjudul “*Inovasi dalam Pengelolaan Perpustakaan*”.

Republik Indonesia, Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 11 Maret No. 0103/0/1981 tentang Perpustakaan.

Republik Indonesia, Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan.

Republik Indonesia, Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan.

Republik Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 7329 tahun 2009 tentang Perpustakaan Sekolah.

Republik Indonesia (2011): Standar Nasional Perpustakaan (SNP) SMA/MA, No. 009.

Republik Indonesia, Undang Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Sinaga, Dian (2007): *Mengelola Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Kreasi Media Utama.

Sutarno NS (2003): *Perpustakaan dan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisi Revisi.

Singarimbun, Masri (1995): *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia

Winarno, Wiji (2010): *Pengetahuan Dasar Perpustakaan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ananda Amin, <http://manajemenlayanankhusus.wordpress.com/2012/06/05/pengelolaan-perpustakaan-sekolah/>, diunduh tanggal 22 Januari 2013

Isnaini, Nur, “*Permasalahan Perpustakaan dan Alternatif Pemecahannya*”, <http://blog.unsri.ac.id/userfiles/PDF/makalah.perpustakaan>, diunduh tgl 13 Januari 2013.

Yuniwati, <http://digilib.undip.ac.id/index.php/component/content/artikel/manajemen-layanan-di-perpustakaan>. diunduh tanggal 1 April 2013.

<http://perpustakaan.narotama.ac.id/2012/02/14/inovasi.pengelolaan.perpustakaan>, diunduh tgl 13 Januari 2013.